

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian Indahsari (2014), evaluasi pemberdayaan petani melalui klaster kentang binaan bank indonesia cabang malang studi kasus program pemberdayaan petani kentang di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (*mixel methots*) antara metode kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab tujuan 1 dan 3 sedangkan untuk menjawab tujuan 2 menggunakan metode deskriptif dengan pengukuran *skala likert*. tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan proses pemberdayaan petani kentang, menganalisis tingkat partisipasi petani kentang dalam mendukung program pemberdayaan petani kentang, mendeskripsikan hasil pemberdayaan petani kentang dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui klaster kentang. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: petani kentang di Desa Tulungrejo mendapatkan peningkatan varietas baru dinilai cukup berhasil, karena petani mengikuti usaha tani kentang dari 275 jumlah anggota menjadi 100 lebih petani yang mengikuti program. perubahan sosial ekonomi masyarakat tani pasca mengikuti program pemberdayaan melalui usaha tani kentang beberapa manfaatnya yaitu penambahan pendapatan, bertambahnya pengetahuan budidaya kentang dan peningkatan ketrampilan wanita tani.

Sunarti (2015), juga melakukan penelitian tentang peranan dinas pertanian (diperta) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di kecamatan sebatik timur kabupaten nunukan Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Pertanian (Diperta) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Melalui Pelaksanaan kegiatan usahatani, Peningkatan Produktivitas usahatani, Peningkatan pendapatan usahatani serta kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu pertama dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung, kemudian dilakukan

penyederhanaan data setelah itu penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kecamatan Sebatik timur belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih memerlukan perhatian dan bimbingan kepada petani mengingat masih rendahnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki petani serta masih kurangnya bantuan fasilitas pertanian. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan usahatani. Perlu peran aktif dari setiap bagian di dalam Dinas pertanian untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pertanian yaitu belum teknisnya jaringan irigasi, masih kurangnya alat-alat pasca panen, masih rendahnya tingkat pengetahuan petani dalam melaksanakan budidaya tanaman padi sawah, tingkat keterampilan dan sikap petani dalam mengelola usahatani serta kurangnya dukungan atas modal dan sarana produksi usahatani serta masih kurangnya pelatihan-pelatihan pada petani seperti Sekolah Lapang, dan kerjasama dengan Instansi terkait seperti dari UPT BP3K, Badan Ketahanan Pangan dan Lembaga lainnya.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Abram (2014), tentang pengaruh kegiatan pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kecamatan torue kabupaten parigi moutong. Masyarakat Kecamatan Torue sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian tentang pengaruh kegiatan pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Torue. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian dan mendeskripsikan kondisi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Torue dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 44 KK sampel petani sawah, serta data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel wilayah dan sampel penduduk menggunakan Purposive Sampling dengan pertimbangan jumlah populasi yang begitu banyak sehingga membutuhkan waktu yang lama, biaya dan tenaga yang banyak. Hasil dari penelitian berdasarkan jawaban dari responden

menunjukkan bahwa faktor kepemilikan lahan, pendapatan, dan pengalaman bertani mempunyai pengaruh dalam mendorong masyarakat bekerja di bidang kegiatan pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Begitu pula dengan faktor jumlah tanggungan, usia dan pendidikan oleh sebagian responden menyatakan mempunyai pengaruh dalam mendorong masyarakat bekerja di bidang kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mencapai kesejahteraan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian – penelitian terdahulu adalah penulis akan meneliti lebih dalam tentang pelaksanaan, tingkat partisipasi program pengembangan pertanian bioindustri berbasis ubi kayu serta dampak terhadap kesejahteraan petani di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek melalui binaan BPTP Jawa Timur. Terdapat perbedaan juga dalam metode Pengambilan sampel, penulis dalam menentukan pengambilan sampel menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti berada langsung pada objeknya, terutama dalam pengumpulan data dan berbagai informasi. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode analisis yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, analisis yang menjelaskan kenyataan yang ada sesuai variabel pengukuran. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi riil yang ada di lapang yang berhubungan dengan program pemberdayaan petani ubi kayu. Analisis data deskriptif dibantu oleh dengan alat kuesioner yang menghasilkan data. Untuk alat pengukuran setiap variabel dalam kuesioner ini akan ditentukan skor dengan menggunakan skala *Likert*. “Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

## 2.2 Tinjauan Pustaka Partisipasi Masyarakat

### 2.2.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Mardikanto *dalam* Indahsari (2014), partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Dari pengertian tersebut maka partisipasi bisa disimpulkan sebagai salah satu elemen pembangunan yang menjadi dasar dari proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang

berjalan, tingkat partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur dari sebuah suksesnya suatu kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan, suatu proses masyarakat terlibat dalam suatu program atau proyek, yang ikut berpengaruh, memberikan inisiatif, pengambilan keputusan dalam pengelolaan, pengembangan program, pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

### 2.2.2 Tipologi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Menurut Khan et al dalam Syahyuti (2006), terdapat tujuh tipologi partisipasi yang menggambarkan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam program dan proyek pembangunan.

#### 1. Partisipasi pasif atau manipulatif (*Passive Participation*).

Tipe ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.

#### 2. Partisipasi informatif (*Participation in Information Giving*).

Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pihak proyek melalui survey kuesioner atau semacamnya. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi juga tidak dibahas bersama masyarakat.

#### 3. Partisipasi konsultatif (*Participation by Consultation*).

Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan tenaga ahli dari luar mendengarkan serta menganalisa masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Ahli dari luar tidak ada kewajiban untuk mengambil pandangan masyarakat untuk ditindaklanjuti.

#### 4. Partisipasi insentif (*Participation of Material Incentive*).

Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan sumberdaya misalnya jasa tenaga kerja dan memperoleh imbalan berupa bahan pangan, upah, atau insentif lainnya. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan.

Masyarakat juga tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan setelah insentif dihentikan.

5. Partisipasi fungsional (*Functional Participation*).

Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok sebagai bagian dari proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung dari pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.

6. Partisipasi interaktif (*Interactive Participation*).

Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk merencanakan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

7. Mandiri (*Self-Mobilization*).

Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontrak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan.

Masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada atau digunakan. Berdasarkan tipologi tersebut, penggunaan terminologi “partisipasi” dalam program harus selalu dikaitkan dengan tipologi partisipasi yang mana. Apabila tujuan dari program adalah untuk tercapainya program yang berkelanjutan, paling tidak tingkat partisipasi yang harus terpenuhi yaitu partisipasi fungsional.

## 2.3 Konsep Pemberdayaan

### 2.3.1 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara dan memilih alternatif kehidupan kearah lebih baik (Mardikanto *dalam* Indahsari 2014). Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pada ininya adalah membuat masyarakat yang semula tidak berdaya, atau tidak mampu (miskin dan

terbelakang) menjadi mampu untuk melepaskan diri dari ketidakmampuannya sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Pemberdayaan dalam konteks struktur masyarakat pada dasarnya menekankan adanya upaya mangasah seluruh potensi masyarakat yang mempunyai mata pencaharian pokok di bidang pertanian yang dalam hal ini adalah petani. Sehingga dalam memberdayakan petani hendaknya menempatkan petani yang memiliki kekuatan, daya, dan potensi untuk mengembangkan diri.

### 2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. pemberdayaan masyarakat bertujuan mendidik masyarakat agar mampu merubah mereka sendiri atau membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri . Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, dan memiliki pola pikir yang *cosmopolitan* (Mardikanto, dalam Indahsari 2014).

Selain yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat
2. Mengetahui pengetahuan dari masyarakat setempat
3. Menentukan pihak-pihak yang berperan dalam masyarakat
4. Membantu memecahkan masalah dari masyarakat
5. Membantu masyarakat untuk berdiskusi tentang suatu masalah
6. Embantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah
7. Membangun kepercayaan diri masyarakat
8. Menentukan program pemberdayaan
9. Pengakuan kekuatan dan sumber dari masyarakat
10. Menumbuhkan kemandirian dalam masyarakat

### 2.3.3 Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto, 2005 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai melalui pendekatan pemberdayaan antara lain:

1. Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat cepat berkembang secara optimal.
2. Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah.
4. Penyokong adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupan.
5. Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pelaksanaan proses pemberdayaan tidak hanya dilakukan secara kolektif. Dalam bebrapa kondisi, strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara inividual. Walaupun demikian strategi tersebut berkaitan dengan kolektivitas dalam arti sasaran pemberdayaan dikaitkan dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Karena itu pemberdayaan dilakukan melalui tiga pendekatan: pendekatan mikro, mezzo, dan pendekatan makro (Suharto, 2005).

#### a. Pendekatan Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task coenterd approach*).

#### b. Pendekatan Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai

strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Pendekatan Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

### 2.3.4 Unsur-Unsur Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto, dalam Indahsari 2014, dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Akseibilitas informai, karena informasi berkaitan dengan peluang, layanan, penegakan hukum, evektivitas negosiasi dan akuntabilitas.
2. Partisipasi, emnyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses.
3. Akuntabilitas, berkaitan dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan atas nama rakyat.
4. Kapasitas organisasi lokal, berkaitan dengan kemampuan bekerja sama, mengorganisir masyarakat, dan memobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Menurut Cook dan Macauly “lebih memandang masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara-cara membebaskan seseorang dari kendala kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya”. Kerangka dasar perberdayaan masyarakat yang dapat dilihat dalam akronim “*ACTORS*” yang terdiri atas *Authority, Concidense and Competence, Trust, Opportunities, Responsibilities, Support*.

1. *Authority* (wewenang)

Wewenang merupakan suatu kekuatan atau kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Masyarakat perlu diberdayakan dengan diberikan kepercayaan untuk menetapkan dan memutuskan suatu program yang akan dilakukan.

2. *Concidence and Competence* (memberi rasa percaya diri dan kompetisi)

Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri dan kompetensi masyarakat. Program pemberdayaan diri dan kompetensi merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. Kompetensi diartikan sebagai karakteristik dari individu yang meliputi pengetahuan, keahlian, pengalaman, sikap, motivasi, dan kepribadian yang akan mempengaruhi untuk kerja seseorang. *Competence* adalah membantu masyarakat agar lebih percaya diri dan memiliki kompetensi untuk berkembang, meliputi:

- a) *Knowledge* (pengetahuan) adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.
- b) *Attitude* (sikap) adalah cara menempatkan atau membawa diri atau cara merasakan, jalan pikiran dan perilaku.
- c) *Skill* (keterampilan) adalah keterampilan yang diperoleh dari kemampuan-kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi.

3. *Trust* (membangkitkan kepercayaan)

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat yakin bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk permasalahan dan memenuhi kebutuhannya. Keyakinan merupakan suatu tindakan untuk mempercayai sesuatu.

4. *Opportunities* (memberi peluang)

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini setiap anggota masyarakat diberikan peluang atau kesempatan untuk memiliki dan menyatakan pendapatnya.

5. *Responsibilities* (memberi dukungan)

Tanggung jawab adalah segala akibat yang timbul dari suatu pembuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Salah satu usaha pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya rasa tanggung jawab. Masyarakat yang bertanggung jawab adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri.

6. *Support* (memberi dukungan)

Dukungan merupakan pemberian informasi verbal atau non verbal, saran, bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek didalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah laku penerimanya.

Dengan menggunakan teori kajian di atas, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu berdayaguna secara optimum.

### **2.3.5 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Edi , 2005 ada 8 indikator keberdayaan, untuk mengetahui tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang berdaya atau tidak. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, kemampuan budaya dan politis.

1. Kebebasan mobilitas

Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

2. Kemampuan membeli komoditi kecil

Kemampuan individu untuk membeli barang-narang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu masakan), kebutuhan dirinya sendiri (sabun mandi, shampoo, minyak wangi). Individu dianggap mampu

melakukan kegiatan ini terutama jika seseorang itu dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

3. Kemampuan membeli komoditi besar

Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah dan pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika seseorang tersebut dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

4. Terlihat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga

Dalam mampu membuat keputusan secara mandiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, dan memperoleh kredit usaha.

5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga

Responden ditanya mengenai apakah dalam suatu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak) yang mengambil uang, tanah, perhiasan tanpa sepengetahuan responden.

6. Kesadaran hukum dan politik

Mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/ kecamatan, seseorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes

Seseorang dianggap berdaya apabila seseorang tersebut pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintahan.

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga

Memilik rumah, tanah asset produktif dan tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika seseorang tersebut memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Menurut Mardikanto, *dalam* Indahsari 2014, ada beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program-program pemberdayaa. Indikator-indikator tersebut adalah:

1. Jumlah warga yang berniat dan tertarik untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
2. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program dalam memperoleh pertimbangan dan persetujuan warga atau suatu ide baru.
3. Frekuensi kehadiran tiap warga dalam setiap kegiatan.
4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh warga.
5. Jumlah dana yang dapat digali oleh warga untuk menunjang pelaksanaan program.
6. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah.
7. Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat.
8. Berkurangnya masyarakat yang menderita.
9. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlu dan pentingnya peningkatan kualitas hidup.
10. Meningkatnya kemandirian masyarakat.

## **2.4 Tinjauan Pustaka Bioindustri**

### **2.4.1 Pengertian Bioindustri**

Secara umum bioindustri adalah aplikasi bioteknologi dalam bidang industri . Menurut Koehler dalam Hermawan (2014) bioteknologi dalam arti luas adalah penerapan teknik biologi dan rekayasa organisme untuk membuat produk atau memodifikasi tanaman dan hewan agar membawa sifat-sifat yang diinginkan. ISAAA dalam Hermawan (2014) mendefinisikan bioteknologi sebagai satu set perangkat yang menggunakan organisme hidup (atau bagian dari organisme) untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki tanaman, pohon atau hewan, atau mengembangkan mikroorganisme untuk suatu tujuan tertentu. Perangkat bioteknologi yang penting bagi pertanian antara lain menyangkut pemuliaan tanaman konvensional, kultur jaringan dan perbanyakan mikro, pemuliaan molekular atau seleksi marka, rekayasa genetika, dan perangkat diagnostik molekuler (ISAAA dalam Hermawan, 2014).

Istilah bioindustri mengacu pada sekelompok perusahaan yang memproduksi rekayasa produk biologi dan bisnis pendukungnya. Bioteknologi tersebut mengacu pada penggunaan ilmu biologi (seperti manipulasi gen), sering juga dikombinasikan dengan ilmu-ilmu lain (seperti ilmu bahan, nanoteknologi, dan perangkat lunak komputer), untuk menemukan, mengevaluasi dan mengembangkan produk untuk bioindustri.

Menurut Li Zhe dalam Hermawan (2014), di Cina ada definisi yang berbeda dari bioteknologi. Organisasi Industri Bioteknologi di AS mendefinisikan bioteknologi sebagai "penggunaan seluler dan proses biomolekuler untuk memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna" dan dalam konvensi Keanekaragaman Hayati, bioteknologi dianggap sebagai "Aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi, organisme hidup, atau turunannya, untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk penggunaan secara spesifik". Di China walaupun definisi bioteknologi pada dasarnya dekat dengan definisi tersebut, tetapi digabungkan dengan kondisi praktis di Cina. Ada dua definisi bioteknologi di Cina. Salah satu penelitian yang didanai oleh *National Developing and Reform Commission (NDRC)* mengusulkan bioteknologi modern berdasarkan pada kemajuan biologi molekuler, termasuk rekayasa genetika, rekayasa protein, teknik selular, teknik enzimatik dan *engineering*. Seentara itu *Ministry of Science and Technology (MOST)* mendefinisikannya sebagai "penggunaan seluler dan biomolekuler, dikombinasikan dengan rekayasa dan teknologi informasi, untuk memecahkan masalah atau meningkatkan nilai tambah produk, atau merekonstruksi hewan, tumbuhan, dan mikroba kepada karakter khusus dan berkualitas untuk penyediaan produk atau jasa". Bioteknologi dengan demikian dianggap sebagai serangkaian penelitian teknologi, desain, dan rekonstruksi biosistem untuk meningkatkan kualitas, menciptakan varietas baru, dan produk atau jasa, antara lain di bidang biologi molekuler, biologi sel, biokimia, biofisika, dan teknologi informasi."

Mangunwidjaja (2013), mendefinisikan bioindustri sebagai industri yang menerapkan sistem proses atau perubahan (transformasi) hayati, termasuk industri yang menerapkan bioteknologi. Bioteknologi adalah prinsip-prinsip ilmu

pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis yang menghasilkan barang dan jasa.

#### 2.4.2 Penerapan Bioindustri Berkelanjutan

Penerapan bioindustri berkelanjutan diawali dengan memilih beberapa atau minimal satu orang dalam satu kawasan secara humanistik untuk menerapkan pertanian dengan sistem bioindustri berkelanjutan. Ada sebuah model pendekatan perilaku yang dapat digunakan dalam penerapan bioindustri yang berkelanjutan, yang telah dibuktikan di puluhan negara berkembang. Model ini berhasil mengubah perilaku didasarkan pada “penyimpangan positif” (*Positive Deviance*) (Sternin dan Choo, dalam Hermawan 2014).

Berpijak pada kondisi dan rasionalitas petani gurem di atas, sejumlah langkah perlu ditempuh dalam penerapan bioindustri, agar petani dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta memperoleh manfaat melebihi korbanan yang dikeluarkan. Secara teknis, penerapan bioindustri harus keluar dari perangkap revolusi hijau dengan mengembalikan cara berbudidaya tani secara tradisional dan alami. Pertanian alami menjadi alternatif sistem pertanian baru berdasar pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan diyakini dapat mengantarkan petani dan sistem pertanian menuju kemandirian penghidupan.

Dalam setiap komunitas, organisasi, atau kelompok sosial terdapat beberapa individu yang mempunyai perilaku dan kebiasaan tersendiri yang membuat mereka mampu mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan orangsekitarnya, meskipun mereka mempunyai sumber daya yang sama. Rahasia merekadapat dianalisis, diisolasi, dan kemudian dibagikan kepada seluruh kelompok. Perilaku orang terpilih tersebut dapat dijadikan semacam demonstrasi plot (demplot). Diperlukan waktu setidaknya tiga musim tanam untuk membuktikan bahwa produktivitas tanaman dengan menggunakan input tradisional (pupuk kandang), panennya dapat mengimbangi produktivitas petani yang menggunakan input “modern” (pupuk kimia). Setelah demplot terbukti berhasil, maka perlu disosialisasikan dalam skala luas. Pada skala lebih luas, pengembangan bioindustri perlu melibatkan sekelompok petani dalam satu kawasan, sebagai upaya pemenuhan skala usaha dan efisiensi.

Empat area strategis yang menjadi pertimbangan petani untuk bergabung dalam kelompok, yaitu dapat mengakses pasar karena sebelumnya mereka menghadapi biaya transaksi yang tinggi, dapat mengakses kredit dengan bunga yang rendah karena sebelumnya mereka mendapatkan bunga tinggi bahkan tidak dapat mengakses ke lembaga permodalan, disediakan berbagai pelayanan untuk dapat mengakses di sektor hulu, dan disediakan informasi, penyuluhan serta dukungan logistik sehingga biaya produksi lebih rendah (Hermawan, 2014).

### 2.4.3 Pertanian Bioindustri

Model pertanian bioindustri merupakan sistem pertanian yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan ternak melalui inovasi teknologi penanganan secara khusus pada *derivate* produk dan sumberdaya hayati (biomassa/limbah pertanian) yang menyeluruh sehingga menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah baik secara ekonomi maupun terhadap aspek lingkungan, sumberdaya alam, bagi kesejahteraan masyarakat.

Pertanian bioindustri menjadi pilihan untuk dikembangkan mengingat ketersediaan sumber daya alam dan energi fosil yang semakin terbatas, kebutuhan pangan dan energi yang semakin besar, serta adanya perubahan iklim. Pada akhirnya, pembangunan sistem pertanian yang mengacu pada konsep bioindustri berkelanjutan diharapkan dapat memperbaiki kondisi pertanian dan pangan di Indonesia. Prinsip dari pertanian berbasis bioindustri, adalah pertanian tanpa limbah, pertanian tanpa impor input produksi, pertanian tanpa impor energi, pertanian pengolah biomassa dan limbah menjadi bio-produk baru bernilai tinggi, pertanian ramah lingkungan, dan pertanian sebagai kilang biologi (*biofineray*) berbasis IPTEK penghasil pangan dan non pangan, ( Hermawan, 2014).

## 2.5 Kesejahteraan Masyarakat

Manusia pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk hidup dengan baik, menurut Suparlan *dalam* Suud (2006), kesejahteraan tercapai ketika mereka mampu mencukupi kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. Pemenuhan tersebut dilakukan dengan segala cara mulai dari belajar, bekerja, dan berdoa. Kondisi terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat menunjukkan suatu tingkatan kesejahteraan sosial dari skala individu maupun kelompok atau

masyarakat luas. Kesejahteraan sosial, menurut Suud (2006), menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, pendapatan, dan perlindungan dari hal-hal yang mengancam kehidupannya.

Menurut Suud (2006), Friedlander menjelaskan kesejahteraan adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan lembaga-lembaga sosial untuk membantu individu-individu dan kelompok—kelompok mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang mampu memberikan kesempatan masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kesejahteraan sesuai kebutuhan keluarga dan masyarakat. Okamura (1992), menjabarkan bahwa ada tujuh karakteristik di dalam kesejahteraan sosial yang apabila tujuh karakteristik tersebut terpenuhi maka otomatis kehidupan masyarakat akan sejahtera.

Karakteristik tersebut adalah:

1. Ekonomi yang stabil
2. Pekerjaan yang layak
3. Keluarga yang stabil
4. Jaminan kesehatan
5. Jaminan pendidikan
6. Kesempatan dalam bermasyarakat
7. Kesempatan budaya atau rekreasi

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki suatu indeks kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan nama IkraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat). Dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat tahun 2013 dijelaskan bahwa Indeks Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan tiga dimensi pengukuran. Dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi keadilan sosial, dimensi keadilan ekonomi, dan dimensi demokrasi dan *governance*. Keadilan sosial bukan hanya menyangkut persoalan proses distribusi atau pemerataan, akan tetapi juga menyangkut upaya pemenuhan kebutuhan dasar, serta tindakan alternatif oleh penyelenggara negara untuk melindungi dan memastikan setiap warga negara mendapatkan pemenuhan terhadap hak dasarnya. Indikator dalam hal ini adalah:

1. Akses rumah tangga terhadap listrik

Kecukupan akses tenaga listrik juga akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat karena listrik menjadi sumber energi penting dalam mendukung seluruh kegiatan masyarakat. Dalam konteks perekonomian, kecukupan listrik menjadi indikator penting untuk menggerakkan sektor riil masyarakat dan meningkatkan nilai tambahnya. Akses pada listrik dihitung berdasar presentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama.

2. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (dihitung dengan mempertimbangkan ijazah dan atau kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki).

3. Akses pada kesehatan

Dalam realitas keseharian, masih dijumpai banyak masyarakat miskin baik yang tinggal di kota maupun di pedesaan seringkali tidak dapat mengakses layanan kesehatan, ataupun karena ketidaktersediaan layanan kesehatan, ataupun karena layanan kesehatan tersebut tidak terjangkau oleh masyarakat dari aspek biaya. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pengukuran indeks kesejahteraan masyarakat akan mengukur jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan kesehatan untuk berobat dalam waktu 6 bulan terakhir. Semakin banyak penduduk yang dapat mengakses kesehatan, menunjukkan bahwa tingkat keterjangkauan penduduk pada layanan kesehatan semakin baik, demikian pula sebaliknya.

4. Rekreasi

Rekreasi dapat digolongkan menjadi kebutuhan tersier yang dapat dipenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Indikator rekreasi diukur dari persentase rumah tangga yang melakukan kegiatan bepergian untuk tujuan rekreasi (berlibur, olahraga/ kesenian).

5. Akses rumah tangga terhadap jaminan sosial

Jaminan sosial diukur dari persentase rumah tangga yang menerima jaminan sosial (JAMKESMAS, kartu sehat, surat miskin (SKTM), lainnya). Persentase ini didapat dari ada atau tidaknya anggota rumah tangga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis .

6. Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai umur 40 tahun.

Tingkat usia harapan hidup di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Namun dalam pengukuran indeks kesejahteraan rakyat, indikator yang digunakan adalah sebaliknya yaitu mengukur jumlah penduduk yang tidak dapat mencapai usia 40 tahun. Termasuk di dalam perhitungan ini adalah angka kematian bayi, kematian ibu, maupun kematian yang disebabkan oleh sebab lain.

7. Akses terhadap air bersih

Air bersih yang dimaksud di sini adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, sumur bor dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/ tinja  $\geq 10$ m, sumur terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/ tinja terdekat  $\geq 10$  meter, atau mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/ tinja terdekat  $\geq 10$ m.

8. Akses terhadap sanitasi

Ukuran yang digunakan untuk mengukur sanitasi dasar dalam indeks kesejahteraan rakyat adalah kepemilikan jamban. Kepemilikan jamban adalah jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban yang digunakan sendiri (bila fasilitas tempat buang air besar hanya dapat digunakan oleh rumah tangga responden saja) atau digunakan secara bersama-sama.

9. Persentase penduduk miskin

Dalam pengukuran yang dilakukan oleh IkraR, jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator yang menunjukkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga seseorang bisa dikatakan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Penamaan yang digunakan pada indikator ini adalah pengeluaran perkapita di atas garis kemiskinan.

10. Tingkat kesenjangan (Gini Rasio)

Salah satu ukuran kesuksesan pembangunan ekonomi adalah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara. Walau demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu memberikan korelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan penduduknya. Salah satu terkait dengan distribusi

pendapatan, apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut memberikan manfaat bagi semua penduduk atau justru menghasilkan jurang ketimpangan yang semakin lebar. Tingginya ketimpangan antar penduduk pada gilirannya bukan hanya memicu permasalahan dalam bidang ekonomi, akan tetapi juga dalam bidang sosial. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pengukuran kesejahteraan yang dilakukan dalam indeks kesejahteraan rakyat menggunakan gini rasio untuk mengukur pemerataan pendapatan penduduk. Semakin merata distribusi pendapatan kepada seluruh rakyat maka ketimpangan atau kesenjangan yang dimiliki semakin rendah, demikian sebaliknya.

Dimensi berikutnya yang menjadi acuan adalah dimensi keadilan ekonomi. Ukuran keadilan rakyat dalam mendapatkan akses dan aset terhadap sumberdaya ekonomi. Yang menjadi ukuran bukanlah indikator-indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dsb. Tetapi indikator yang menunjukkan ketersediaan akses ekonomi bagi warga. Berikut adalah indikator yang ada pada dimensi keadilan ekonomi:

1. Rasio PAD terhadap APBD

Indikator rasio PAD terhadap APBD digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan fiksial suatu daerah dalam melaksanakan program pembangunannya dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Selain itu, dapat dilihat juga apakah besarnya PAD berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan di suatu wilayah. Data PAD tersedia secara baik dan dijamin keberlanjutannya di BPS.

2. Ketersediaan dan akses ke BANK

Prinsipnya semakin besar akses rakyat terhadap sumber permodalan, maka semakin besar kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam perhitungan IkraR ini indikator dari Susenas yang digunakan adalah persentase rumah tangga yang menerima kredit dari bank.

3. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja

Indikator penduduk yang bekerja penting mengingat dengan bekerja rakyat akan mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran sehingga akan terlihat jelas jenis intervensi apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah

pengangguran dan menjamin bahwa masyarakat mendapat kesempatan kerja yang baik dan berkelanjutan. Dalam perhitungan IkraR ini indikator Susenas yang digunakan adalah persentase penduduk usia 15 tahun yang bekerja.

#### 4. Jumlah penduduk yang memiliki rumah

Dalam perhitungan IkraR, indikator kepemilikan rumah ini menggunakan indikator Susenas yang mengukur persentase penduduk yang memiliki rumah sendiri.

#### 5. Perbandingan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan

Prinsipnya apabila rasio pengeluaran lebih besar daripada garis kemiskinan maka masyarakat lebih sejahtera, begitupun sebaliknya. Dalam perhitungan IkraR ini indikator dari Susenas yang digunakan adalah rasio rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dengan garis kemiskinan (GK).

#### 6. Tingkat pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan

Dalam perhitungan IkraR ini indikator Susenas yang digunakan adalah proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan (biaya SPP, pendaftaran, iuran, pramuka, alat tulis, uang kursus, dll) terhadap total pengeluaran rumah tangga per bulan.

#### 7. Tingkat pengeluaran masyarakat untuk kesehatan

Dalam penghitungan IkraR ini indikator dari Susenas yang digunakan adalah proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan (ongkos rumah sakit, puskesmas, obat-obatan dll) terhadap total pengeluaran rumah tangga per bulan.

Dimensi ketiga adalah dimensi demokrasi dan governance, dimensi ini merupakan pengukuran kesejahteraan rakyat yang melihat kemajuan pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang menjamin hak rakyat berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan demokrasi secara mandiri tanpa diskriminasi. Indeks-indeks dalam dimensi ini adalah sebagai berikut,

##### 1. Rasa aman

Dalam perhitungan IkraR ini indikator yang diukur adalah tingkat keamanan warga dari gangguan kejahatan, yaitu persentase terjadinya kejahatan yang dilaporkan ke polisi. Indikator dari Susenas yang digunakan adalah persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan selama setahun terakhir.

##### 2. Akses informasi

Sesuai dengan ketersediaan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) maka indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat akses terhadap informasi adalah persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam waktu 3 bulan terakhir. Indikator akses terhadap internet ini penting karena saat ini memang penggunaan internet dan teknologi informasi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di negara-negara yang lebih maju. Selain itu, internet juga mencerminkan kemajuan infrastruktur di suatu daerah, baik yang bersifat software maupun hardware dan infrastruktur lainnya.

### 3. Aspek kebebasan sipil

Kesejahteraan perlu diukur dari kebebasan warga untuk hidup dan mengembangkan kehidupannya karena keadilan ekonomi dan keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila kebebasan warga untuk mengerti dan memanfaatkan kebebasannya dijamin. Tentunya kebebasan yang dimaksud disini tidak diartikan sebagai kebebasan yang menafikan tanggung jawab sosial. Demokrasi yang matang terjadi apabila kebebasan yang diterapkan berpegang teguh pada tanggung jawab sosial atau kebebasan yang menghormati tanggung jawab sosial. Dalam mengukur indikator kebebasan sipil ini digunakan komponen dalam indeks demokrasi Indonesia.

### 4. Aspek hak-hak politik

Indikator atas hak-hak politik warga dapat diukur melalui tingkat partisipasi politik warga dalam prosedural demokrasi baik dalam menentukan kebijakan, peraturan perundang-undangan maupun dalam proses Pemilu. Artinya, pengukuran hak-hak politik rakyat tidak terbatas pada proses pemilu, melainkan juga mencakup hak-hak politik tersebut digunakan sebaik-baiknya sebagai prinsip dalam hidup berdemokrasi di Indonesia. Sebagaimana aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik ini indikatornya diperoleh dari salah satu komponen dalam indeks demokrasi Indonesia.

### 5. Aspek lembaga demokrasi

Apabila dikaitkan dengan konsep kesejahteraan dimana tidak hanya diukur secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dimana kuatnya modal sosial juga menjadi salah satu modal untuk mencapai keadilan ekonomi dan sosial karena telah menyepakati bahwa trust adalah kunci dalam berdemokrasi. Intinya lembaga

demokrasi sangat diperlukan sebagai wadah atau media bagi warga, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menyuarkan hak dan kewajibannya. Indikator lembaga demokrasi ini juga diambilkan dari komponen indeks demokrasi Indonesia.

